

FLYPAPER EFFECT TERHADAP BELANJA DAERAH PADA KABUPATEN BIREUEN

Imam Malik,S.E.,M.Si¹⁾, Lakharis Inuzula, S.E., M.Si, Ak²⁾

¹⁾Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Kebangsaan Indonesia
Email : Imam.malik03@gmail.com

²⁾ Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Kebangsaan Indonesia
Email : Lf.inuzula@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the effect of PAD and DAU on Regional Expenditures and then analyze the flypaper effect. The sampling technique used is purposive sampling with a sample of the Realization Report of the Regional Revenue and Expenditure Budget of Bireuen Regency in 2011-2015. The data used in this research is secondary data. The analytical method used is descriptive statistical test, hypothesis testing and multiple linear regression models. The result of this study is that DAU and PAD simultaneously have a significant effect on Regional Expenditures. Partially, DAU has no significant effect on Regional Expenditures and PAD has a significant effect on Regional Expenditures. During the research period, there was a flypaper effect in Bireuen Regency because the value of DAU to Regional Expenditures was greater than the value of PAD to Regional Expenditures.

Keywords: *General Allocation Fund (DAU), Regional Original Revenue (PAD), Regional Expenditure, Flypaper Effect*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Daerah dan kemudian menganalisis *flypaper effect*. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling dengan sampel Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bireuen tahun 2011-2015. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah uji statistik deskriptif, uji hipotesis dan model regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah DAU dan PAD secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Secara parsial DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah dan PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Selama periode penelitian terjadi *flypaper effect* di Kabupaten Bireuen karena nilai DAU terhadap Belanja Daerah lebih besar dari pada nilai PAD terhadap Belanja Daerah.

Kata Kunci : *Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Daerah, Flypaper Effect*

PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor.32 Tahun 2004 pasal 1 ayat (5) tentang pemerintah daerah yang telah menggantikan Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1999. Dengan berlakunya kedua undang-undang tersebut di atas membawa konsekuensi bagi daerah dalam bentuk pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara yang efisien dan efektif, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial (Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005).

Beberapa peneliti menemukan respon pemerintah daerah berbeda untuk transfer dan pendapatan sendiri (seperti pajak). Ketika penerimaan daerah berasal dari transfer, maka stimulasi atas belanja yang ditimbulkannya berbeda dengan stimulasi yang muncul dari pendapatan daerah (terutama pajak daerah). Oates (1999) menyatakan bahwa ketika respon (belanja) daerah lebih besar terhadap transfer daripada pendapatannya sendiri, maka disebut *flypaper effect* (Halim, 2002).

Peneliti sebelumnya seperti Mutiara Maimunah (2006) meneliti di Sumatera, Unun Dian Anggraeni (2010) meneliti di Provinsi Jawa Tengah, serta Ang Sandera Widjajakoesoema (2011) di Kota Kediri dan memperoleh hasil yaitu, PAD tidak signifikan berpengaruh terhadap belanja daerah. Hal tersebut berarti terjadi *flypaper effect*. Hal ini sesuai dengan hipotesisnya yang menyatakan pengaruh DAU terhadap BD lebih besar daripada pengaruh PAD terhadap BD diterima.

Tiap pulau atau daerah mempunyai ke khasan tersendiri, baik dari sisi geografis maupun keadaan ekonominya. Karena itulah maka peneliti ingin meneliti bagaimana pengaruh DAU dan PAD terhadap belanja daerah dan apakah terjadi *flypaper effect* dari pengaruh tersebut pada

pemerintah daerah Bireuen. Dua hal yang dapat terjadi pada penelitian ini adalah terjadi atau tidaknya flypaper effect pada pengaruh DAU dan PAD terhadap belanja daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Otonomi Daerah

Otonomi Daerah menurut Undang-Undang Nomor.32 Tahun 2004 pasal 1 ayat (5) tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, didukung oleh perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah serta propinsi dan kabupaten/kota yang merupakan prasyarat dalam sistem pemerintah daerah.

Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menuju prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian kewenangan otonomi kepada daerah didasarkan atas asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab (Mardiasmo, 2001).

Menurut Suparmoko (2002) mengartikan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa otonomi daerah dapat diartikan sebagai wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah baik kabupaten maupun kota untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing dan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku dan mengikatnya.

Flypaper Effect

Pengaruh transfer pada kinerja fiskal pemerintah daerah dapat dijelaskan dari teori perilaku konsumen. Wilde dalam Hastuti (2011) mempelopori analisis transfer ke dalam format kendala anggaran dan kurva indiferensiasi. Transfer bersyarat (*conditional grants*) berpengaruh pada konsumsi barang privat melalui efek harga. Bantuan bersyarat, misalnya transfer penyeimbang tidak terbatas (*open-ended matching grants*), akan menurunkan harga barang

publik. Dalam konteks ini, pemerintah memberikan subsidi untuk setiap unit barang publik. Pengaruh transfer bersyarat pada konsumsi barang privat tergantung pada sensitivitas silangnya. Jika, harga barang publik yang lebih rendah akan meningkatkan konsumsi barang privat apabila pemerintah daerah telah menurunkan tarif pajak. Dengan adanya hal tersebut, maka kenaikan transfer sebagian berakibat pada kenaikan konsumsi barang publik dan sebagian lagi pada konsumsi barang privat secara tidak langsung melalui penurunan tarif pajak.

Fenomena *flypaper effect* membawa implikasi lebih luas bahwa transfer akan meningkatkan belanja pemerintah daerah yang lebih besar daripada penerimaan transfer itu sendiri Turnbull dalam Hastuti (2011). Fenomena *flypaper effect* ini dapat terjadi dalam dua versi Gorodnichenko dalam Hastuti (2011). Pertama, merujuk pada peningkatan pajak daerah dan anggaran belanja pemerintah yang berlebihan. Kedua, mengarah pada elastisitas pengeluaran terhadap transfer yang lebih tinggi daripada elastisitas pengeluaran terhadap penerimaan pajak daerah.

Flypaper Effect itu sendiri merupakan respon yang tidak simetris atau asimetris terhadap peningkatan dan penurunan penggunaan dana transfer dari pemerintah pusat, dimana Tresch (2002) menyatakan bahwa dana transfer tersebut diberikan untuk jangka waktu tertentu dengan indikasi adanya pihak yang memperoleh keuntungan dari penerimaan transfer (grants) yang cenderung meningkat. Dengan kata lain penemuan *flypaper effect* pada alokasi pengeluaran, maka diharapkan pemerintah dapat seminimum mungkin memperkecil respon yang berlebihan pada belanja daerah. *Flypaper Effect* adalah suatu fenomena pada suatu kondisi ketika pemerintah daerah merespon belanja daerahnya lebih banyak berasal dari transfer/ grants atau spesifiknya pada transfer tidak bersyarat atau unconditional grants daripada pendapatan asli dari daerahnya Bintoro (2011).

Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat (21) dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Sumber penerimaan daerah dalam konteks otonomi dan desentralisasi untuk saat ini masih sangat didominasi oleh bantuan dan sumbangan dari pemerintah pusat baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagi hasil, sedangkan porsi PAD masih relatif kecil Mardiasmo (2004).

Menurut Erlina dkk (2008), Dana Alokasi Umum adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap daerah otonom (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. Dana Alokasi Umum yang merupakan penyangga utama pembiayaan APBD sebagian besar terserap untuk belanja pegawai, sehingga belanja untuk proyek-proyek pembangunan menjadi sangat berkurang. Yani (2008), mengungkapkan bahwa Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dilakoasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Brojonegoro dan C. Risyana dalam Sidik, dkk (2002) Dana Alokasi Umum adalah transfer bersifat umum yang jumlahnya sangat signifikan dimana penggunaannya menjadi kewenangan daerah.

Adapun cara menghitung dana alokasi umum menurut ketentuan adalah sebagai berikut Widodo (2007) :

1. Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang – kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
2. Dana Alokasi UMUM (DAU) untuk daerah propinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan masing – masing 10% dan 90% dari dana alokasi umum sebagaimana di tetapkan di atas.
3. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu daerah kabupaten/kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah dana alokasi umum untuk seluruh daerah kabupaten/kota yang ditetapkan dalam APBN dengan porsi daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
4. Porsi daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot daerah kabupaten/kota yang bersangkutan terhadap jumlah bobot semua daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang Nomor.33 Tahun 2004 pasal 1 ayat (18) pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Menurut Warsito (2001) Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, restribusi

daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

Menurut Halim (2004) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari :

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain PAD yang sah

Belanja Daerah

Belanja daerah menurut Undang-Undang Nomor.33 Tahun 2004 pasal 1 ayat (14) adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut Mankiw (2007), pembelian pemerintah atau belanja pemerintah adalah permintaan terhadap barang dan jasa. Pembelian pemerintah atas barang dan jasa dapat digolongkan kepada dua golongan yaitu konsumsi pemerintah dan investasi pemerintah.

Dalam Peraturan menteri dalam negeri Nomor.13 Tahun 2006 pasal 31 ayat (1) Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja Daerah menurut kelompok belanja terdiri dari:

- a. Belanja Tidak Langsung
- b. Belanja Langsung

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder dapat berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang tersusun dalam arsip, baik yang dipublikasi maupun tidak dipublikasi. Data sekunder dalam penelitian ini berupa data runtut waktu (time series) yaitu

Laporan realisasi APBD Pemerintah daerah Kabupaten Bireuen tahun 2011-2015 yang diperoleh dari kantor pemerintahan Kabupaten Bireuen di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD).

Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Pemerintah Kabupaten Bireuen di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Bireuen.

Definisi Konsep

1. Lingkungan Bisnis

Lingkungan dalam konteks lingkungan bisnis harus diartikan secara luas yaitu tidak hanya sebatas lingkungan ekologis (*ecologica enviroment*) saja suatu terminologi yang telah umum dikenal masyarakat, tetapi mencakup faktor yang lebih luas antara lain ialah lingkungan sosial, teknologi, persaingan, ekonomi dan lain-lain.

2. Pertumbuhan Usaha

Menurut Suprpto (Peter Setiawan, 2010) pertumbuhan perusahaan adalah peningkatan ukuran usaha dan adanya ekspansi operasi perusahaan melalui pengelolaan kekuatan yang ada dalam perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Misalnya dalam kurun waktu dua tahun, tiga tahun terdapat peningkatan ukuran usaha secara fisik atau adanya pangsa pasar yang lebih luas.

Operasional Variabel

NO	VARIABEL	RUMUS
1	Dana Alokasi Umum (DAU) (X_1)	DAU= Alokasi Dasar + Celah Fiskal
2	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X_2)	PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan + Lain-lain PAD yang sah
3	Belanja Daerah (Y)	Belanja Daerah = Belanja Tidak Langsung + Belanja langsung

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Deskriptif Variabel Penelitian

Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh tabel stastistik sebagai berikut:

Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DAU	5	480.010.000.000	780.023.929.000	668494796400.00	124986179263.060
PAD	5	68.456.162.830	168.341.625.954	121237283789.00	42614485553.798
BD	5	766.422.242.783	1.429.730.868.690	1109223929911.00	278659838092.008
Valid N (listwise)	5				

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa :

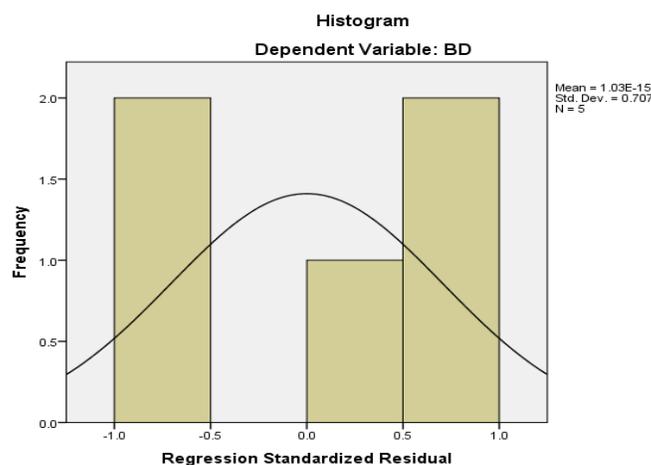
1. Rata-rata DAU (X1) adalah 668.494.796.400,00 dengan standar deviasi sebesar 124986179263,060 dan jumlah data yang ada sebanyak 5. Nilai DAU terendah adalah 480.010.000.000 dan nilai DAU tertinggi adalah 780.023.929.000
2. Rata- rata PAD (X2) adalah 121.237.283.789,00 dengan Standar devisiasi sebesar 42614485553,798 dan jumlah data yang ada sebanyak 5. Nilai PAD terendah adalah 68.456.162.830 dan nilai PAD tertinggi 168.341.625.954
3. Rata-rata BD (Y) adalah 1.109.223.929.911,00 dengan standar devisiasi sebesar 278659838092,008 dan jumlah data sebanyak 5. Nilai BD terendah adalah 766.422.242.783 dan nilai BD tertinggi 1.429.730.868.690

Hasil Asumsi Klasik

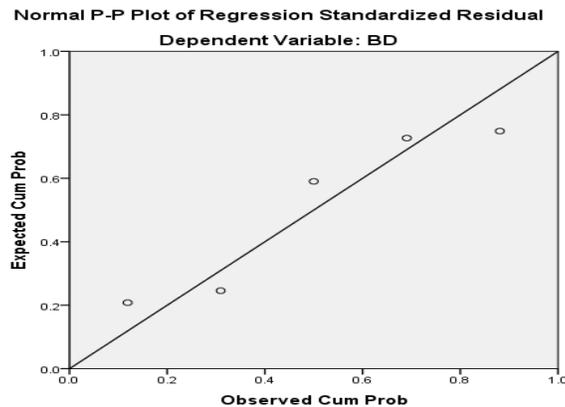
Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah data variabel independen dan dependen berdistribusi normal. Pengujian normalitas ini dilakukan dengan menggunakan grafik histogram, *normal probalbilty plot* serta Kolmogorov-Smirnov Test dengan hasil sebagai berikut:

Hasil Uji Grafik Histogram



Hasil Uji Grafik Normalitas



Menurut grafik diatas data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya. Hal ini menunjukkan pola terdistribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		5
	Mean	.0000263
Normal Parameters^{a,b}	Std. Deviation	18151835646.96
	Absolute	.235
Most Extreme Differences	Positive	.235
	Negative	-.227
Kolmogorov-Smirnov Z		.235
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^c

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Cignificance Correction

Berdasarkan hasil diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi (Asymp.Sig. (2-tailed) adalah sebesar 0.200 lebih besar dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas Ghozali (2006). Hasil pengujian menggunakan SPSS adalah sebagai berikut:

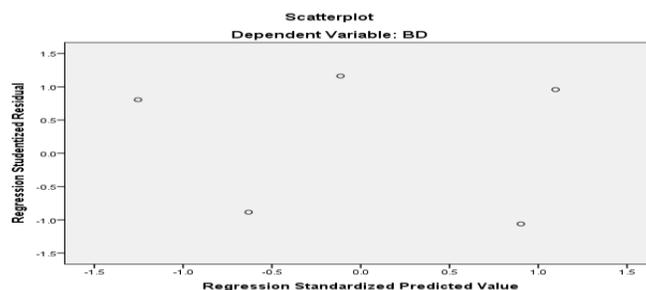
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
DAU	.075	13.415
PAD	.075	13.415

Berdasarkan tabel diatas terdeteksi tolerance value DAU 0,075 dan PAD 0,075 lebih kecil dari 0,1 dan nilai VIF (Variance Inflation FaCtor) DAU sebesar 13,415 dan PAD sebesar 13,415 lebih besar dari 10 sehingga dapat disimpulkan terjadi multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Hasil Uji Heteroskedastisitas



Dari hasil grafik tersebut, dapat dilihat bahwa diantara plot satu dengan yang lain tidak ada yang menyatu. Antara plot saling terpisah. Hal ini menunjukkan bahwasanya tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.829	1.286		2.200	.159
DAU	.108	.376	.049	.288	.801

PAD	6.219	1.103	.951	5.638	.030
-----	-------	-------	------	-------	------

a. Dependent Variable: BD

Dari tabel dapat dilihat nilai sig DAU sebesar 0,801 dan sig PAD sebesar 0,030 semua variabel memiliki nilai sig > 0,05. Sehingga disimpulkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Hasil Uji Autokorelasi

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	5855841041.73611
Cases < Test Value	2
Cases >= Test Value	3
Total Cases	5
Number of Runs	5
Z	1.200
Asymp. Sig. (2-tailed)	.230

a. Median

Berdasarkan tabel diatas nilai Asymp.Sig. (2-tailed) adalah 0,230 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi.

Hasil Penelitian

Analisis regresi bertujuan mengukur seberapa besar hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, juga menunjukkan bagaimana hubungan antara variabel independen dengan dependen, sehingga dapat membedakan variabel independen dengan variabel dependen tersebut Ghozali (2006).

Hasil Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.829	1.286		2.200	.159
DAU	.108	.376	.049	.288	.801
PAD	6.219	1.103	.951	5.638	.030

a. Dependent Variable: BD

Berdasarkan tabel diatas, persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = 2.829 + (0.108X1) + (6.129X2)$$

Dengan persamaan regresi linier berganda tersebut dapat dijelaskan bahwa :

1. Nilai konstanta adalah sebesar 2.829 artinya apabila nilai DAU dan PAD bernilai nol, maka belanja daerah Sebesar 2.829.
2. Koefisien regresi untuk variabel DAU sebesar 0,108 hal ini menunjukkan bahwa setiap pertambahan 1% faktor DAU maka akan menaikkan belanja daerah sebesar 108%
3. Koefisien regresi untuk variabel PAD sebesar 6,129 hal ini menunjukkan bahwa setiap pertambahan 1% faktor PAD maka menaikkan belanja daerah sebesar 6,129%.

Nilai DAU sig sebesar 0,801 dan nilai PAD sig sebesar 0,030. Variabel DAU memiliki nilai sig > 0,05 dan variabel PAD memiliki nilai sig < 0,05 sehingga dapat disimpulkan pengaruh variabel DAU terhadap variabel dependen menunjukkan hasil yang tidak signifikan dan variabel PAD terhadap variabel dependen menunjukkan hasil yang signifikan.

Identifikasi *Flypaper Effect*

Flypaper effect merupakan suatu kondisi keuangan pemerintah daerah yang membelanjakan lebih banyak atau lebih boros menggunakan dana transfer atau DAU daripada menggunakan dana sendiri atau PAD. Untuk menentukan apakah terjadi flypaper effect pada keuangan pemerintah daerah maka harus dibandingkan besarnya nilai DAU terhadap belanja daerah dengan nilai PAD terhadap belanja daerah.

Berdasarkan hasil statistik yang tampak pada Tabel menunjukkan besarnya nilai dari DAU dan PAD terhadap belanja daerah. Didapat nilai DAU lebih besar daripada PAD terhadap belanja daerah. Karena nilai DAU lebih besar dari PAD terhadap belanja daerah berarti terjadi flypaper effect pada keuangan daerah pemerintah Kabupaten Bireuen pada tahun 2011-2015. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bireuen memiliki pola ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya DAU dari seluruh belanja Kabupaten Bireuen dan perkembangan PAD yang tidak terlalu besar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat di tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut

1. Pengujian secara simultan menunjukkan bahwa DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini menunjukkan DAU dan PAD memiliki pengaruh yang besar terhadap belanja daerah. Semakin besar DAU dan PAD maka belanja daerah akan semakin besar pula.
2. Pengujian secara parsial menunjukkan bahwa DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini menunjukkan DAU mengalami peningkatan, belanja daerah juga mengalami peningkatan. Tetapi besarnya peningkatan DAU tidak sebanding dengan peningkatan belanja daerah.
3. Pengujian secara parsial menunjukkan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini menunjukkan semakin besar PAD maka belanja daerah akan semakin besar pula. Jadi semakin besar pendapatan yang diperoleh dari PAD maka semakin besar pula dana yang harus disalurkan lewat belanja daerah untuk melaksanakan pemerintahan di daerah.
4. Dari analisis *flypaper effect* dapat disimpulkan terjadi *flypaper effect* pada belanja daerah Kabupaten Bireuen. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bireuen memiliki pola ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya DAU dari seluruh pendapatan Kabupaten Bireuen dan perkembangan PAD yang tidak terlalu besar

DAFTAR PUSTAKA

- Ang Sandera Widjajakoesoema, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Kota Kediri", Jurnal Cahaya Aktiva Vol. 01 No. 01, September 2011.
- Baihaqi, "Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Propinsi Bengkulu", Jurnal Akuntansi Vol. 1 No. 3 (2011) 246-266, Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu.
- Bambang Agus Pramuka, "Flypaper Effect Pada Pengeluaran Pemerintah Daerah Di Jawa", Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 11 No. 1 JUNI 2010, hlm 1-12, Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman.
- Deni Oktavia, "Flypaper Effect: Fenomena Serial Waktu Dan Lintas Kabupaten Kota Di Jawa Timur 2003-2013", Program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Diah Ayu Kusumadewi dan Arief Rahman, "Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kabupaten/Kota Di Indonesia", Jurnal JAAI Vol. 11 No. 1 JUNI 2007:67-80.

- Dini Arwati dan Novita Hadiati, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja dan Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Barat”, Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi Terapan 2013 (SEMANTIK 2013), Semarang, 16 November 2013, Universitas Widyatama Bandung.
- Ferly Christian Kolinug, Anderson G. Kumenaung dan Debby Ch. Rotinsulu, “Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kota Manado”, Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi.
- Fitri Amalia, “Analisis Flypaper Effect Pada Belanja Daerah Kabupaten dan Kota Di Propinsi Banten”, Jurnal Organisasi dan Manajemen, Vol. 11 No. 1, Maret 2015, 15-25, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Fitriana, “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bontang”, ejournal Ilmu Pemerintahan, 2014, 1 (2): 1875-1888 ISSN 2338-3651 ejournal.ilmu.pemerintahan.ac copyright 2014.
- Haryo Kuncoro, “Fenomena Flypaper Effect Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten Di Indonesia”, Universitas Negeri Jakarta. Paper disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi X Makassar.
- I Made Pradana Adiputra, “Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Karangasem”, Universitas Pendidikan Ganesha.
- Indhi Hastuti, “Analisis Flypaper Effect Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) (Studi Pada Kota dan Kabupaten Semarang)”, Program Studi Akuntansi Universitas Diponegoro.
- Irfan Khairul Umam, “Potensi Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Indramayu”.
- Lino Hedyanto dan Sri Rahayu, SE., M.Ak., Ak., “Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pada Kota Bandung Periode 2008-2012”, Universitas Telkom.
- Maimunah Mutiara. 2006. “Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera”, STIE Musi Palembang . Paper disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi IX Padang.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Thia Dwi Utami dan Kardinal, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu”, Jurusan Akuntansi STIE MDP.

Tryana A.M. Tiraada, “Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak dan Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP Di Kabupaten Minahasa Selatan”, Jurnal EMBA Vol. 1 No. 3 September 2013, 999-1008, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado.

Unun Dian Anggraeni dan Yohanes Suhardjo, “Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah”, SOLUSI, Vol. 9 No. 1, Januari 2010:69-81, Fakultas Ekonomi Universitas Semarang.